

**ANALISIS KOMPARASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI KOTA PADANG**

*Comparative Analysis of Community Empowerment in The Hopeful
Family Implementation Program
in The City of Padang*

¹Vika Yvanka, ²Aldri Frinaldi, ³Lince Magriasti

^{1,2,3}Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

¹vikayvanka@gmail.com, ²aldri@fis.unp.ac.id, ³lincemagriasti@fis.unp.ac.id

Kata Kunci:

ABSTRAK

Program Keluarga
Harapan,
Pemberdayaan
masyarakat, Masyarakat
Miskin, Bantuan Sosial

Kota Padang merupakan daerah kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat akibat penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga diterapkanlah Program Keluarga Harapan yang dalam penerapannya di bantu Pendamping PKH. Namun terdapat kendala seperti tugas Pendamping PKH tidak dilaksanakan secara maksimal dan kurangnya koordinasi Pendamping PKH dengan Organisasi Masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung PKH. Penelitian ini bertujuan menjelaskan implementasi PKH yang di dukung oleh Peran Pendamping PKH di Kota Padang, kemudian hasil program ini akan peneliti bandingkan dengan Implementasi PKH di kota-kota yang ada di Indonesia. Penelitian ini disajikan menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif komparasi. Kemudian, pembahasan serta penyusunan dilakukan dengan pendekatan studi pustaka melalui literatur jurnal ilmiah yang relevan atau melalui informasi online. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan program ini dilakukan dengan pemberian bantuan sosial, memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan budidaya ikan kecil serta pelatihan membuat oleh-oleh di Kelompok Wanita Nelayan. Selain itu, peran pendamping memainkan peran yang strategis dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan, taraf pendidikan anak terutama RTSM, serta status kesehatan dan gizi ibu hamil dan nifas, serta anak di bawah 6 tahun dari RTSM. Jika dibandingkan dengan kota lain, penerapan PKH di Kota Padang masih belum sempurna sehingga perlu dibandingkan untuk menjadi cerminan maupun motivasi dalam penerapannya.

Keywords:

Hope Family Program,
Community
Empowerment, Poor
Society, Social Assistance

Abstract

Padang city is the poorest area in West Sumatra province due to the unequal distribution of population. This led to the implementation of the Family Hope Program, assisted by PKH facilitators in its implementation. However, obstacles included suboptimal mandates for PCH facilitators and lack of coordination between PCH facilitators and community organizations, which affected the level of community involvement in supporting PCH. This study aims to describe the implementation of PKH assisted by her PKH companion role in Padang city. The researchers will then compare the results of this program with the implementation of PKH in Indonesian cities. This study is presented using a qualitative method with descriptive comparative analysis methods. This is followed by discussion and preparation using literary approaches based on relevant scientific journal literature and online information. The survey results revealed that the implementation of the program is through the provision of social support, training and advice to fishermen and small-scale fish farmers, and training of women fishermen's groups to make souvenirs. In addition, Companion plays a strategic role in improving the socioeconomic status of extreme poor households (RTSM), the quality of education and health services, children's education levels, especially RTSM levels, and maternal health and nutrition. Postpartum women are also eligible Children under 6 years old. RTSMs. Compared to other cities, the implementation of PKH in Padang city is still not perfect, so comparison is needed to reflect and motivate the implementation.

A. PENDAHULUAN

Hasil perhitungan *Gross National Income (GNI)*, Negara Indonesia masuk ke dalam 91 negara tahun 2022 dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak di dunia dengan angka PDB dan PPP RI sebesar US\$14.535. Tingkat kemiskinan di Indonesia di sebabkan oleh minimnya pengeluaran seseorang untuk memenuhi kebutuhannya seperti memenuhi kebutuhan pokok hidup baik (CNN Indonesia 2022). Permasalahan kemiskinan telah menjadi permasalahan global yang terjadi di seluruh dunia, Indonesia salah satunya dengan mayoritas masyarakat berada pada taraf ekonomi rendah. Kepadatan penduduk menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang berakibat pada tingginya tingkat kriminalitas, kesehatan, dan pendidikan yang rendah. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "...negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Oleh karena itu, pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang berhak mengatur negaranya membentuk program pemberdayaan masyarakat yang berguna untuk mengatasi kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) atau di dunia dikenal istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* yang dimulai di Indonesia sejak 2007. Menurut Kementerian Sosial RI (Kemensos RI 2019), Program Keluarga Harapan merupakan sebuah program yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat dengan ketentuan dan persyaratan

yang telah ditentukan dengan fokus dalam rangka meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia yang dilakukan dengan pemberdayaan ibu hamil dan anak-anak. Program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia terutama dalam bidang pendidikan dan Kesehatan.

PKH dilaksanakan oleh setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang memiliki penduduk yang lebih banyak dibanding daerah lainnya. Jumlah penduduk Kota Padang Tahun 2021 sebanyak 913.448 jiwa. Jumlah ini meningkatkan pertumbuhan penduduk sebesar 0,48% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, penyebaran penduduk di Kota Padang dapat dikatakan tidak merata yang disebabkan masih adanya penumpukan penduduk di beberapa kecamatan seperti Nanggalo yang mencapai 7.227 jiwa/Km² dan Padang Timur dengan kepadatan mencapai 9.485 jiwa/Km² (BPS Kota Padang 2022). Kepadatan penduduk di Kota Padang meningkatkan jumlah masyarakat miskin di Kota Padang, yaitu sebesar 4,26% dari jumlah penduduk Kota Padang tahun 2022, yaitu sebesar 44,37 ribu jiwa (BPS.go.id 2022). BAPPEDA menciptakan Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk menghapus kemiskinan secara ekstrem di Kota Padang. Melalui program ini, dilakukan peningkatan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, serta menurunkan jumlah kantong kemiskinan yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Beberapa permasalahan terjadi dalam implementasi PKH ini, seperti Penerapan PKH di Kelurahan Pauh Kota Padang, di mana di bentuk Kelompok Pengolahan Pangan Lele (Weno 2021). Program ini berhasil dilaksanakan yang dibuktikan dengan meningkatkan pendapatan penduduk kampung Pinang Kelurahan Pauh Kota Padang. Namun masih adanya kendala yang di hadapi, yaitu proses administrasi dan pencatatan masih belum terdata dengan baik karena seluruh anggota kelompok masih mempelajari dan membutuhkan pendampingan yang intens.

Selain memberikan bantuan tunai, PKH juga memberikan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang akan di dampingi oleh Pendamping PKH yang ditunjuk langsung oleh Dinas Sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pendamping PKH yang dikenal dengan pekerja sosial adalah seseorang yang ditunjuk Lembaga pemerintah maupun swasta karena memiliki kemampuan bekerja sosial dan memiliki kepedulian dalam pekerjaan sosial yang di dapatkan dari pendidikan, pelatihan, dan praktik, serta pengalaman dalam pekerjaan sosial. Pendamping PKH ini bertugas menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga terkait pengembangan, sebagai pemberdayaan masyarakat miskin yang dapat menjadi mitra masyarakat dan pemerintah serta berperan dalam memberikan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan (Rahmawati and Kisworo 2017). Pendamping PKH berperan sebagai pendidik, fasilitator, dan wakil teknikal yang mempengaruhi jalannya PKH. Namun dalam pelaksanaannya, Pendamping PKH tidak menjalankan tugasnya secara maksimal sehingga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sekitar dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. Kemudian, kurangnya koordinasi antara pendamping PKH dengan Organisasi Masyarakat yang dibentuk sebagai tempat untuk aspirasi masyarakat dan tempat untuk berkarya. Sedangkan, Pendamping PKH di Kota Padang di dukung penuh oleh Wali Kota Padang yang menyatakan bahwa Pendamping PKH memainkan peran yang strategis dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, taraf

pendidikan anak terutama RTSM, serta status kesehatan, dan gizi ibu hamil dan nifas, serta anak di bawah 6 tahun dari RTSM (Harian Haluan Sumbar 2019).

B. METODE

Penelitian ini di buat dengan tujuan menjelaskan implementasi PKH yang di dukung oleh Peran Pendamping PKH di Kota Padang kemudian hasil program ini akan peneliti bandingkan dengan Implementasi PKH di kota-kota di Indonesia. Penelitian ini disajikan menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif komparasi yang merupakan analisis yang membandingkan suatu kondisi yang sama untuk menemukan kesamaan maupun perbedaan, menemukan sebab akibat dan faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena (Sugiono 2012). Proses pengumpulan data diperoleh melalui data-data terkait Program PKH di Kota Padang dan kota lainnya melalui teknik dokumentasi melalui data sekunder yang diperoleh dari situs resmi. Kemudian, pembahasan serta penyusunan dilakukan dengan pendekatan studi pustaka melalui literatur jurnal ilmiah yang relevan atau melalui informasi *online*. Menurut Miles dan Michael (Miless and Michael 1994), analisis data akan diolah dalam tiga jalur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi PKH di Kota Padang

Program Keluarga Harapan merupakan sebuah program perlindungan sosial yang membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam rangka memperkuat kualitas sumber daya manusia yang dilakukan dengan pemberdayaan ibu hamil dan anak-anak. PKH diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, memiliki kewajiban di bidang kesehatan dengan menyediakan pelayanan pemberian imunisasi dan asupan gizi untuk anak balita, pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, serta anak prasekolah. Kemudian, kesejahteraan sosial untuk disabilitas dan lanjut usia dengan syarat di atas 60 tahun. Sedangkan untuk bidang pendidikan, PKH berkewajiban untuk mendaftarkan serta memastikan anggota keluarga PKH mendapatkan layanan pendidikan dari dasar hingga menengah. Bantuan berupa uang tunai di cairkan kepada paling banyak 4 orang dalam satu keluarga dengan bantuan tetap regular diberikan sebesar Rp 550.000,-/keluarga/tahun serta PKH akses diberikan sebesar Rp 1.000.000,-/keluarga/tahun (Kemensos RI 2019). Untuk mengetahui apakah kita penerima bansos PKH, masyarakat dapat melihat di *website* cekbansos.siks.kemensos.go.id. dengan memasukkan nama sesuai KTP. Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 20 Kabupaten/Kota memiliki jumlah penduduk miskin sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin Kota-Kota Sumatera Barat Tahun 2019-2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (juta jiwa)		
		2019	2020	2021
1	Padang	42.44	42.17	48.44
2	Solok	2.29	1.99	2.31
3	Sawah Lunto	1.35	1.36	1.52
4	Padang Panjang	3.00	2.84	3.28
5	Bukittinggi	6.00	6.01	6.98
6	Payakumbuh	7.68	7.74	8.66
7	Pariaman	4.20	3.66	3.99
Total		348.22	344.23	370.63

Sumber: bps.go.id, 2022.

Dapat dilihat pada Tabel 1, Kota Padang masih menempati peringkat satu kota dengan jumlah kemiskinan terbanyak di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2022. BAPPEDA menciptakan Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk menghapus kemiskinan secara ekstrem di Kota Padang. Melalui program ini, dilakukan peningkatan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, serta menurunkan jumlah kantong kemiskinan yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Bappeda.Padang.go.id 2023). Pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kota Padang melalui Program P3KE ini, pemerintah mengupayakan melalui pemberdayaan masyarakat melalui nelayan dan budidaya ikan kecil. Sebagai kota yang dekat dengan perairan, pendapatan utama masyarakat miskin di Kota Padang berasal dari mata pencaharian sebagai nelayan. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap nelayan dan pembudidayaan ikan, maka di bentuk kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil. Penelitian Simanullang dan Eriyanti (Simanullang and Eriyanti 2019) menghasilkan bahwa DKP memberikan pelatihan kantor lurah dan SP3N, di mana nelayan akan dibina dan diberikan arahan untuk meningkatkan pendapatannya. Selain itu, di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang, dibentuk Kelompok Usaha Bersama yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat nelayan seperti penyampaian permintaan alat tangkap. Selain mengolah ikan dan kripiik ikan, ibu-ibu nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang yang dekat dengan objek wisata Pasia jambak, juga diberi pelatihan untuk menciptakan oleh-oleh khas melalui Kelompok Wanita Nelayan (Munaf, Alipuddin, and Rahayu 2022). Namun dalam pelaksanaannya, Kelompok Wanita Nelayan ini belum mendapatkan pelatihan batik secara intens. Pemberdayaan wanita nelayan tersebut masih perlu peningkatan keahlian dan pelatihan agar dapat bersaing dengan pasar batik yang didominasi oleh Batik Jawa, sehingga pendapatan Kelompok Wanita Nelayan masih rendah.

Pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Padang di 11 kecamatan sebagai bantuan kepada masyarakat masa pemulihan *pandemic covid* serta menyambut Idul Fitri sebanyak 36.104 keluarga penerima manfaat. Untuk penyaluran program PKH dan Sembako dapat dilihat dari gambar berikut:

LAKIP 2022

**DAFTAR REALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
TAHUN 2022**

1	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KK MISKIN	LOKASI KEGIATAN	ALOKASI APBN TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN			KETERANGAN
							FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	(%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga										
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah keluarga miskin yang menerima PKH	Keluarga Sangat Miskin	21.113	Kota Padang	17.170.150.000	100,00	16.995.775.000	98,98	Tahap 1
				20.815	Kota Padang	17.435.225.000	100,00	17.347.225.000	99,50	Tahap 2
				21.294	Kota Padang	17.693.575.000	100,00	17.493.800.000	98,87	Tahap 3
TOTAL						52.298.950.000	100,00	51.836.800.000	99,12	

Gambar 1
Realisasi Program Keluarga Harapan
Sumber: LAKIP Dinas Sosial Kota Padang, 2023.

Dengan dana tersebut hingga April 2023, bantuan sosial berupa sembako telah tersalurkan 35.244 atau 97,62% dari jumlah keluarga penerima manfaat. Bantuan ini disalurkan melalui Mitra PKH, yaitu PT. Pos Indonesia dengan tiga cara, yaitu penyaluran melalui pos, penyaluran melalui komunitas, diantarkan langsung kepada penerima KPM yang sedang sakit, disabilitas maupun lansia (Antara Sumbar 2023). Pada tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah meluncurkan berbagai program seperti PKH, bantuan sosial berupa sembako, dan bantuan sosial berupa uang tunai untuk pengendalian dampak inflasi.

Pelaksanaan PKH dibantu oleh Pendamping PKH yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kota Padang untuk membantu pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Padang. Pendamping PKH memainkan peran yang strategis meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan, taraf pendidikan anak terutama RTSM, status kesehatan dan gizi ibu hamil dan nifas, serta anak di bawah 6 tahun dari RTSM sehingga pendamping PKH ini didukung oleh pemerintah Kota Padang. Pada 2019 lalu, Pendamping PKH diberi bantuan berupa sepeda motor sebanyak 25 unit kendaraan operasional untuk pendamping PKH di Kota Padang dalam acara Silaturahmi dan Bakti Sosial Tagana se-Sumatera Barat oleh Bapak Walikota, Mahyeldi (Harian Haluan Sumbar 2019). Kemudian di tahun 2022, Wali Kota Padang, Bapak Hendri Septa memberikan bantuan kepada 30 orang anggota PKH di kecamatan Lubuk Begalung yang diberikan melalui Camat Heriza syafani (Padang.go.id 2022). Bantuan tersebut berupa bahan pokok seperti minyak goreng, tepung serta alat elektronik peralatan dapur.

2. Analisis Komparasi Implementasi PKH di Indonesia

Analisis deskriptif komparasi yang merupakan analisis yang membandingkan suatu kondisi yang sama untuk menemukan kesamaan maupun perbedaan. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan pelaksanaan PKH di Kota Padang dengan kota lainnya yang dapat dibandingkan dalam penyelenggaraan PKH. Pelaksanaan PKH di dukung dengan adanya pemilihan Uda-Uni PKH sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah ke masyarakat yang berasal dari pendamping PKH. Pada pemilihan Uda-Uni duta PKH 2019 dimenangkan oleh Uda Fauzi Eka Putra yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman (Dinsosppa.padangpariamankab.go.id 2019). Adanya orang sebagai orang terpandang akan menarik perhatian masyarakat sehingga pada saat duta PKH maupun pendamping PKH bertemu dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memberikan motivasi untuk semangat kemandirian, penyuluhan maupun sosialisasi dapat dilaksanakan secara maksimal. Kemitraan yang dilakukan oleh Kabupaten Padang Pariaman ini juga dilaksanakan oleh Kecamatan Banuhampu, bekerja sama antara Pendamping PKH dengan Nan Apik Penyuluhan Agama Islam Fungsional Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam (Sumbar.kemenag.go.id 2021). Kemitraan ini dilakukan melalui penyuluhan untuk menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai anak merupakan amanat Tuhan sehingga perlu dipastikan kehidupannya, terutama kesehatan dan pendidikan. Selain itu, orang tua sebagai pendidikan pertama anak wajib melindungi dari kekerasan secara fisik, psikis, dan seksual. Kemitraan Kota Padang masih kurang memenuhi persyaratan dan masih mengalami kendala dalam menyatukan tujuan bersama.

Kota Malang melaksanakan PKH untuk memutuskan rantai kemiskinan dengan mengaktifkan partisipasi seluruh masyarakatnya melalui pemberdayaan masyarakat Kelompok Usaha Bersama (Permana, Sasmito, and Gunawan 2018). Implementasi PKH ini di dukung dengan keberadaan pendamping PKH yang aktif dan memiliki kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta taraf hidup mandiri. Pada bidang kesehatan, masyarakat dan pendamping PKH peduli akan kesehatan keluarganya dan sadar akan pentingnya Kesehatan terutama ibu hamil dan anak-anak. Tersedianya fasilitas kesehatan, terutama ruang persalinan memadai, perawatan ibu nifas, serta perawatan balita seperti penimbangan balita dan program imunisasi tersedia di Posyandu. Sedangkan, pada bidang pendidikan, orang tua di Kota Malang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Jika ada anak yang putus sekolah, Pendamping PKH bersama Dinas Sosial bekerja sama untuk membujuk dan membantu menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih adanya aturan pendamping PKH yang masih berganti sehingga mempengaruhi persiapan kemitraan untuk mendukung program PKH di Kota Malang. Hal ini dapat menjadi cerminan bagi Kota Padang dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat agar dapat tercapainya keberhasilan PKH di Kota Padang. Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto juga mengusung konsep yang sama dengan Kota Malang, yaitu memutuskan rantai kemiskinan dengan memanfaatkan peran Pendamping PKH, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil, masih adanya beberapa Kendala dalam penerapannya (Kholif, Noor, and Siswidiyanto 2019). Kendala yang dihadapi, yaitu berupa tanggung jawab yang bertabrakan antara pendamping PKH dan UPPKH Kabupaten Mojokerto. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan kontrak pendamping PKH dan aturan Pendamping PKH dituntut menjadi CPNS serta adanya

permasalahan dana untuk mendukung pelaksanaan program dan pengadaan fasilitas. Selain itu, masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya perannya dalam keberhasilan PKH namun tidak adanya bimbingan dan arahan dari pemerintah maupun Pendamping PKH untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini, Kota Padang memiliki keunggulan karena SOP dan tanggung jawab masing-masing pihak yang mendukung PKH yang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PKH yang di keluarkan oleh Kementerian Sosial RI tahun 2021-2024.

Beberapa daerah memiliki strategi yang berbeda dalam melaksanakan PKH di daerahnya, seperti halnya dengan Kota Bitung yang menyusun strategi melalui komunikasi yang intens dengan masyarakat agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan penyuluhan dan sosialisasi dari Dinas Sosial (Manongga, Sofia Pangemanan, and Kairupan 2018). Kota Bitung menjelaskan peran masyarakat lebih besar dibanding dengan peran pemerintah maupun Pendamping PKH sebagai fasilitator. Selain itu, sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Kota Bitung secara keseluruhan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menanggulangi kemiskinan melalui PKH. Strategi ini juga dilaksanakan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan (A. Mandolang, Daicy Lengkong, and Dengo 2019). Program ini didukung dengan kompleksnya struktur birokrasi yang tertata dengan baik dan memiliki SOP masing-masing serta mudah dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat. Namun, dalam hasil evaluasinya masih lemahnya komunikasi dalam pelaksanaan PKH yang dibuktikan dengan masih adanya masyarakat miskin yang belum menerima bantuan dari program ini. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat yang kesulitan mendaftarkan dirinya secara *online*.

Strategi yang dilaksanakan Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar adalah mengatasi kemiskinan dengan sasaran utama Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri anak yang usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih (Daud and Marini 2019). Pelaksanaan program ini disiapkan dari tujuan yang diinginkan, kemudian dilakukan pemilihan lokasi dan sasaran peserta serta penentuan peran Pendamping PKH yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PKH yang di keluarkan oleh Kementerian Sosial RI Tahun 2021-2024. Bahkan Dinas Sosial tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada peserta yang tidak menaati aturan yang telah dibuat agar mendapat efek jera, dan menumbuhkan kesadaran diri masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam keberhasilan PKH. Strategi ini dapat diterapkan di Kota Padang karena masih banyaknya masyarakat yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan sosial tersebut semestinya mereka dapat dimanfaatkan dengan membuka usaha agar memiliki pendapatan lebih besar dan timbulnya kemandirian masyarakat.

D. SIMPULAN

Program Keluarga Harapan di Kota Padang di terapkan melalui program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk menghapus kemiskinan secara ekstrem di Kota Padang melalui strategi kebijakan yang meliputi peningkatan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, serta menurunkan jumlah kantong kemiskinan yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Penerapan program tersebut dilakukan dengan pemberian bantuan sosial, memberikan pelatihan, dan penyuluhan kepada nelayan dan budidaya

ikan kecil serta pelatihan membuat oleh-oleh di Kelompok Wanita Nelayan. Selain itu, peran pendamping memainkan peran yang strategis dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, taraf pendidikan anak terutama RTSM, status kesehatan dan gizi ibu hamil dan nifas, serta anak di bawah 6 tahun dari RTSM.

Jika dibandingkan dengan kota lain, penerapan PKH di Kota Padang masih belum sempurna sehingga perlu dibandingkan untuk menjadi cerminan maupun motivasi dalam penerapannya. Seperti halnya Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan penyuluhan melalui Duta PKH dan Kabupaten Agam melakukan penyuluhan bersama Nan Apik Penyuluhan Agama Islam Fungsional Kecamatan Banuhampu. Sama halnya dengan strategi Kota Bitung yang menyusun strategi melalui komunikasi yang intens dengan masyarakat agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan penyuluhan dan sosialisasi dari Dinas Sosial. Kemudian, dalam memutuskan rantai kemiskinan Kota Malang melalui dukungan keberadaan Pendamping PKH yang aktif dan memiliki kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta taraf hidup mandiri. Sedangkan, Kabupaten Minahasa didukung oleh struktur birokrasi yang tertata dengan baik dan memiliki SOP masing-masing serta mudah dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat.

REFERENSI

- A. Mandolang, Yosua, Florance Daicy Lengkong, and Salmin Dengo. 2019. "Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Administrasi Publik* 5 (79): 1–8.
- Antara Sumbar. 2023. "Penyaluran Bansos Sembako Dan PKH Di Padang Hampir 100 Persen." *AntaraNews2*, April 16, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3490989/penyaluran-bansos-sembako-dan-pkh-di-padang-hampir-100-persen#mobile-src>.
- Bappeda.Padang.go.id. 2023. "Bappeda Bercerita - Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kota Padang." Bappeda Kota Padang. 2023. <https://bappeda.padang.go.id/2022/bappeda-bercerita-strategi-penghapusan-kemiskinan-ekstrem-di-kota-padang#:~:text=Kondisi Persentase Penduduk Miskin Kota,%25%2Cdengan jumlah 6.070 jiwa>.
- BPS.go.id. 2022. "Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat (Ribu Jiwa), 2019-2021." Badan Pusat Statistik. 2022. <https://padangkota.bps.go.id/indicator/161/350/1/jumlah-penduduk.html>.
- BPS Kota Padang. 2022. *Kota Padang Dalam Angka (Padang Municipality in Figure)*. Edited by CV. Adyta. Padang: BPS Kota Padang. <https://padangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Zjg3OWJINGQ5YmM2N2RmMTQ0ZjBhNzgw&xzmn=aHR0cHM6Ly9wYWRhbmdrb3RhLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIyLzAyLzI1L2Y4NzliZTRkOWJjNjdkZjE0NGYwYTc4MC9rb3RhLXBhZGFuZy1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDIyLmh0bWw%3D&tw>.
- CNN Indonesia. 2022. "RI Masuk 100 Negara Paling Miskin Di Dunia." *CNN Indonesia*, September 30, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220930123851-532-854651/ri-masuk-100-negara-paling-miskin-di-dunia#:~:text=Indonesia masuk dalam 100 negara paling miskin di dunia.,%243.870 per kapita pada 2020>.
- Daud, Muhammad, and Yushita Marini. 2019. "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam

- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin." *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 2 (1): 29–38. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.51>.
- Dinsosppa.padangpariamankab.go.id. 2019. "Padangpariaman Raih Prestasi Uda Duta PKH Sumbar." Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. 2019. <https://dinsosppa.padangpariamankab.go.id/home/posting/Padangpariaman-raih-prestasi-Uda-Duta-PKH-Sumbar>.
- Harian Haluan Sumbar. 2019. "Pendamping PKH Kota Padang Terima Kendaraan Operasional." *Harian Haluan*, November 26, 2019. <https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-10217786/pendamping-pkh-kota-padang-terima-kendaraan-operasional>.
- Kemensos RI. 2019. "Program Keluarga Harapan (PKH)." Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2019. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.
- Kholif, Khodziah Isnaini, Irwan Noor, and Siswidiyanto. 2019. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2 (4): 709–14.
- Manongga, Alman, Sofia Pangemanan, and Josef Kairupan. 2018. "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1 (1): 1–10.
- Miless, Mathew B., and A. Haberman Michael. 1994. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Munaf, Yuniarti, Alipuddin, and Sonia Rahayu. 2022. "PELATIHAN MEMBATIK SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN WANITA NELAYAN KELURAHAN PASIE NAN TIGO KOTA PADANG." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 5458: 101–11.
- Padang.go.id. 2022. "30 Orang Anggota PKH Kecamatan Lubeg Terima Bantuan." *Pemerintah Kota Padang*, 2022. <https://www.padang.go.id/30-orang-anggota-pkh-kecamatan-lubeg-terima-bantuan>.
- Permana, Arif Citra, Cahyo Sasmito, and Cakti Indra Gunawan. 2018. "IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN DI KOTA MALANG (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)." *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 10 (2): 64–74.
- Rahmawati, Evi, and Bagus Kisworo. 2017. "Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 1 (2): 161–69. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>.
- Simanullang, Jubel Hot P, and Fitri Eriyanti. 2019. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN TANGKAP OLEH DKP KOTA PADANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN (Studi Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang)." *Ranah Research Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 1 (2): 253–63. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/47/44>.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumbar.kemenag.go.id. 2021. "Kolaborasi Nan Apik Penyuluh Agama Dan Pendamping PKH Tingkatkan Kualitas Jiwa KPM PKH." Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. 2021. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/63033/kolaborasi-nan-apik-penyuluh-agama-dan-pendamping-pkh-meningkatkan-kualitas-jiwa-kpm-pkh>.
- Weno, Ferdian. 2021. "Peran Pendampingan Dalam Program Bangun Industri Desa Oleh PKPU HI Di Kampung Pinang Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh." Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/100085/>.

Undang-Undang dan Peraturan:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial